



Implementasi Pembinaan Kemandirian Seni Ukir Kentongan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Anang Wibowo¹, Vivi Sylviani Biafri²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: anangwibyk@gmail.com, vivi_biafri@yahoo.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 01 Oktober 2025

ABSTRACT

This study examines the implementation of self-reliance development through kentongan carving training for inmates at Class IIB Sleman Penitentiary as a strategic effort to provide work skills for post-release life. The objective of this research is to analyze the program's implementation process, identify the challenges encountered, and explore opportunities for strengthening through external collaboration. A qualitative case study method was employed using interviews, observations, and documentation supported by data triangulation. The findings indicate that the carving training program has been implemented but remains suboptimal due to limited instructors, inadequate facilities, and the absence of external training support. The implications highlight the importance of partnerships with art communities, higher education institutions, and civil society organizations to enhance the quality of training, reduce recidivism, and promote more effective social reintegration of inmates.

Keywords: Self-Reliance Development, Kentongan Carving Art, Inmates

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai strategi pembekalan keterampilan kerja untuk mendukung kehidupan pasca-bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta peluang penguatan melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilengkapi triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan seni ukir kentongan telah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan instruktur, fasilitas, dan dukungan pelatihan eksternal. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kemitraan dengan komunitas seni, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat kualitas pembinaan, mengurangi residivisme, serta mendorong reintegrasi sosial narapidana secara lebih efektif.

Kata Kunci: Pembinaan Kemandirian, Seni Ukir Kentongan, Narapidana

PENDAHULUAN

Pengangguran masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan konsekuensi serius, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterampilan terbatas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024 mencatat sekitar 7,20 juta orang Indonesia berstatus pengangguran. Di lingkup ASEAN, Indonesia bahkan menduduki posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran 5,2%, diikuti Filipina 5,1% dan Brunei Darussalam 4,9%. Kondisi ini juga tercermin di Provinsi Yogyakarta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,24% atau sekitar 71,33 ribu orang menganggur dari total angkatan kerja. Realitas ini memperlihatkan bahwa isu pengangguran masih menjadi tantangan fundamental dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah (ILO, 2023).

Tingginya angka pengangguran berpotensi melahirkan problem sosial berupa peningkatan tindak kriminalitas. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta kepadatan penduduk sering kali mendorong individu untuk terjerumus dalam tindakan kriminal. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Maret 2025 menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Sleman menampung 294 kasus tindak pidana, dengan kasus pencurian mendominasi sebanyak 109 kasus. Fenomena residivisme juga masih tinggi karena mantan narapidana sulit mengakses lapangan kerja akibat stigma sosial dan keterbatasan keterampilan. Studi internasional menegaskan bahwa keterhubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan bersifat signifikan, sehingga kebijakan pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberdayaan ekonomi (Clear, 2018; Sampson & Loeffler, 2020).

Sebagai upaya solusi, lembaga pemasyarakatan mengembangkan program pembinaan kemandirian untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja. Di Lapas Kelas IIB Sleman, salah satu bentuk pembinaan yang diimplementasikan adalah pelatihan seni ukir kentongan. Program ini tidak hanya menekankan keterampilan teknis, melainkan juga mengandung dimensi psikososial berupa pembentukan kemandirian, kreativitas, dan kepercayaan diri. Pemilihan seni ukir kentongan relevan dengan potensi lokal Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata, sehingga hasil karya narapidana memiliki nilai ekonomi sekaligus pelestarian budaya. Praktik serupa di berbagai negara menunjukkan bahwa keterampilan berbasis seni dapat menjadi instrumen rehabilitasi yang efektif, karena mampu menumbuhkan rasa percaya diri, identitas baru, dan motivasi sosial-ekonomi bagi narapidana (Johnson, 2019; Cox & Gelsthorpe, 2021).

Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan program pembinaan di lapas masih menghadapi hambatan yang kompleks. Keterbatasan fasilitas, minimnya instruktur ahli, dan kurangnya dukungan eksternal sering kali mengurangi efektivitas pelatihan. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian global tentang program rehabilitasi, di mana faktor sumber daya, dukungan komunitas,

dan keberlanjutan program merupakan determinan penting keberhasilan reintegrasi sosial (Ward & Maruna, 2020; Shukla & Ghosh, 2022). Oleh karena itu, inovasi model pembinaan yang melibatkan mitra eksternal, seperti komunitas seni, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan tersebut.

Selain aspek teknis dan manajerial, pembinaan kemandirian narapidana juga memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan sosial. Program pelatihan keterampilan kerja di lembaga pemasyarakatan dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi inklusi sosial, yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan nomor 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan demikian, upaya pembinaan narapidana tidak hanya berorientasi pada pengurangan angka residivisme, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan produktif (United Nations, 2023).

Penelitian ini berfokus pada implementasi program pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman. Kajian ini diarahkan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan pembinaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menawarkan alternatif solusi berbasis kolaborasi multi-pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana serta merumuskan strategi penguatan program dalam rangka mendukung reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi pasca-pembebasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena dinilai paling relevan untuk memahami fenomena implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman secara mendalam dan holistik. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan petugas lapas, narapidana, serta pihak-pihak terkait sebagai informan kunci, sementara peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam keseluruhan proses pengumpulan hingga analisis data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi empirik secara deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi yang komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan program pembinaan, hambatan yang muncul, serta upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas pembinaan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman

Program pembinaan kemandirian seni ukir kentongan di Lapas Kelas IIB Sleman merupakan salah satu bentuk nyata upaya pembinaan yang menekankan pentingnya pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja produktif. Program ini tidak hanya bertujuan menghasilkan karya seni bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana melatih keterampilan, membentuk kedisiplinan, dan menanamkan kepercayaan diri bagi narapidana. Keberhasilan implementasi program dianalisis dengan menggunakan empat dimensi sebagaimana dikemukakan Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, terdapat tiga indikator utama: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi dilakukan secara berjenjang dari kepala lapas hingga narapidana, bahkan memakai strategi jemput bola dengan mendatangi langsung blok hunian. Namun, hambatan muncul karena belum adanya pelatihan eksternal dari lembaga atau mitra khusus seni ukir, sehingga keterampilan teknis narapidana dan petugas masih terbatas pada pembelajaran otodidak. Konsistensi komunikasi dijaga dengan penyampaian informasi rutin dua minggu sekali, sedangkan kejelasan pesan diwujudkan melalui instruksi rinci, pemberian motivasi, serta kesempatan bagi narapidana untuk mengonfirmasi pemahamannya. Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa meski sudah berjalan relatif baik, keberhasilan implementasi masih terhambat minimnya kolaborasi dengan pihak luar yang dapat memperkaya transfer pengetahuan.

Dimensi sumber daya juga berpengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan program. Dari sisi staff, keterbatasan jumlah dan kompetensi menjadi tantangan yang cukup serius karena satu petugas kerap harus menangani dua kegiatan pembinaan sekaligus. Latar belakang pendidikan petugas yang rata-rata setingkat SMA membuat keterampilan seni ukir diperoleh secara mandiri melalui media sosial, sehingga tidak sepenuhnya memadai untuk kebutuhan teknis yang rumit seperti membuat miniatur kentongan. Dari segi informasi, petugas sudah menyampaikan detail tahapan pembuatan seni ukir mulai dari menghaluskan, melubangi, mengukir, hingga finishing, yang diserap dengan baik oleh narapidana. Wewenang petugas dalam mengatur jalannya kegiatan juga jelas, termasuk pengawasan penggunaan alat tajam, pencatatan melalui sistem bon, hingga penilaian kualitas produk. Namun, fasilitas masih sangat terbatas. Alat ukir yang tersedia hanya satu set dan digunakan bergantian, sebagian besar manual tanpa dukungan teknologi modern, serta bahan baku kayu berasal dari limbah dengan kualitas bervariasi. Selain itu, ruang kerja yang sempit dan dipakai untuk tiga kegiatan berbeda membuat kondisi kerja kurang kondusif. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Aspek disposisi menekankan pada sikap, komitmen, dan motivasi petugas dalam menjalankan pembinaan. Petugas Lapas Kelas IIB Sleman berupaya

menciptakan suasana pembinaan yang hangat dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga narapidana diperlakukan layaknya anak sendiri. Pendekatan ini membuat narapidana merasa lebih dihargai dan bersedia mengikuti pembinaan tanpa paksaan. Komitmen petugas tidak hanya tampak dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga dalam upaya membangun niat baik narapidana agar mereka menyadari pentingnya keterampilan sebagai bekal hidup setelah bebas. Beberapa narapidana bahkan sudah memiliki rencana membuka usaha sendiri berkat pengalaman pembinaan. Dari sisi insentif, narapidana memperoleh premi penjualan karya dengan pembagian resmi, yaitu 50% untuk narapidana, 35% untuk dana pembinaan, dan 15% untuk negara. Insentif ini masuk langsung ke rekening brizzi masing-masing narapidana, sehingga lebih transparan dan meminimalisasi penyalahgunaan. Insentif bagi petugas tidak ada karena mereka sudah menerima gaji ASN, namun komitmen mereka tetap terjaga berkat rasa tanggung jawab moral. Insentif non-materi berupa ilmu, pengalaman, dan kesempatan untuk berkarya juga menjadi bagian penting yang mendorong narapidana tetap termotivasi mengikuti pembinaan. Dengan demikian, dimensi disposisi memperlihatkan bagaimana karakter petugas dan insentif yang diberikan mampu memperkuat keberlanjutan program, meskipun fasilitas dan keterampilan teknis masih terbatas.

Dimensi terakhir adalah struktur birokrasi, yang meliputi penerapan SOP dan fragmentasi kerja. SOP dalam pembinaan seni ukir kentongan telah dilaksanakan dengan baik, dimulai dari pemanggilan narapidana menggunakan bon, penggeledahan sebelum dan sesudah kegiatan, pengawasan selama proses berlangsung, hingga penjualan produk hasil karya. Meski begitu, keterbatasan ruang dan alat masih menjadi hambatan utama. Fragmentasi atau pembagian tugas antarpetugas juga sudah berjalan cukup jelas, dengan kasubsie kegiatan kerja dan staff sebagai penanggung jawab. Namun, jumlah petugas yang terbatas membuat sebagian harus menangani lebih dari satu kegiatan, sehingga mengurangi fokus dalam pembinaan. Meski demikian, koordinasi tim tetap dijaga dengan sistem kerja berbasis tim, di mana lima petugas bimker berperan sebagai pembina umum dan saling mendukung. Mereka berbagi peran dalam pengawasan, pengarahan, serta kontrol kualitas agar pembinaan tetap berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan jumlah personel dan fasilitas, struktur birokrasi yang jelas dengan SOP yang ketat serta koordinasi tim yang solid tetap menjadi penopang keberhasilan implementasi program pembinaan kemandirian seni ukir kentongan di Lapas Kelas IIB Sleman.

Hambatan dalam implementasi program pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian seni ukir kentongan di Lapas Kelas IIB Sleman merupakan salah satu bentuk inovasi pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan narapidana melalui kegiatan produktif. Meski secara umum program ini telah berjalan cukup baik, dalam praktiknya tetap menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hambatan pertama berkaitan dengan aspek komunikasi, khususnya pada transmisi dan kejelasan informasi. Selama ini pembinaan seni ukir hanya dilakukan oleh petugas internal lapas tanpa adanya dukungan pelatihan eksternal yang secara khusus mendalami seni ukir kentongan. Berbeda dengan kegiatan lain seperti membuat bersama Fakultas Teknik UGM atau pembuatan sabun bersama PT Momo Nusantara yang pernah melibatkan mitra dari luar, kegiatan seni ukir kentongan sama sekali belum mendapatkan dukungan pelatihan serupa. Ketiadaan pelatihan eksternal membuat narapidana sulit menguasai teknik ukir secara mendalam, terutama pada pembuatan miniatur kentongan yang memerlukan keterampilan detail dan ketelitian tinggi. Sementara itu, petugas yang bertindak sebagai pembina juga belum memiliki keahlian khusus di bidang seni ukir sehingga proses transfer keterampilan berjalan terbatas. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa sebagian petugas harus mengampu lebih dari satu kegiatan pembinaan, sehingga fokus mereka terbagi dan kualitas bimbingan tidak maksimal. Hambatan komunikasi dan keterbatasan pelatihan ini menunjukkan adanya gap antara tujuan pembinaan yang ingin menghasilkan karya seni bernilai ekonomi sekaligus melestarikan budaya lokal dengan realitas kemampuan teknis yang masih rendah. Padahal, apabila seni ukir kentongan dikelola dengan baik, kegiatan ini tidak hanya berpotensi menjadi sumber ekonomi bagi narapidana, tetapi juga dapat berkontribusi pada upaya menjaga eksistensi seni pewayangan sebagai warisan budaya bangsa yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

Selain faktor komunikasi, hambatan lain muncul dari keterbatasan sumber daya, terutama pada aspek sarana dan prasarana. Sarana berupa alat ukir yang tersedia di bengkel kerja lapas masih sangat terbatas jumlahnya dan seluruhnya bersifat manual. Hanya terdapat satu set peralatan ukir yang digunakan bergantian oleh seluruh peserta pembinaan sehingga efisiensi kerja menjadi rendah. Alat tersebut juga harus terus diasah agar tetap tajam, yang menambah beban teknis di luar aktivitas inti pembinaan. Dari sisi prasarana, ruang kerja yang digunakan juga belum mendukung kebutuhan pembinaan seni ukir. Satu ruangan dipakai untuk tiga jenis kegiatan sekaligus, yaitu pembuatan mebel, pembuatan sofa, serta ukiran kentongan. Posisi ruang seni ukir kentongan yang terletak di bagian pojok dalam membuatnya sering terpapar debu dari aktivitas penggergajian kayu untuk mebel, sehingga lingkungan kerja menjadi kotor, berdebu, dan kurang kondusif. Hal ini tidak hanya menurunkan kenyamanan, tetapi juga berpotensi merusak detail ukiran yang membutuhkan presisi tinggi. Terbatasnya sarana dan prasarana ini mengindikasikan bahwa meski ada semangat dari pihak lapas untuk mengembangkan pembinaan seni ukir, dukungan fasilitas belum memadai. Keterbatasan ini jelas masuk dalam faktor sumber daya menurut Edwards III, di mana kualitas dan kelengkapan fasilitas menjadi salah satu syarat utama keberhasilan implementasi suatu program.

Hambatan berikutnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Petugas yang seharusnya menjadi fasilitator pembinaan belum sepenuhnya memiliki keterampilan seni ukir yang memadai, sehingga proses bimbingan lebih banyak bersifat teknis dasar dan otodidak. Minimnya pelatihan khusus untuk petugas juga membuat mereka kurang percaya diri dalam memberikan arahan yang bersifat mendalam dan artistik kepada narapidana. Selain itu, dari sisi kuantitas, jumlah petugas juga tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang harus dibina. Berdasarkan hasil observasi, Lapas Kelas IIB Sleman memiliki total 112 petugas untuk mengelola 260 warga binaan, terdiri atas 99 tahanan dan 161 narapidana. Pada seksi kegiatan kerja yang menaungi sembilan jenis program pembinaan, hanya tersedia lima petugas untuk membina 28 narapidana. Rasio yang tidak seimbang ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan pembinaan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses pengawasan, pendampingan, serta evaluasi hasil karya tidak bisa dilakukan secara intensif, padahal pembinaan kemandirian menuntut adanya kontrol ketat untuk menjamin kualitas dan kedisiplinan narapidana. Situasi ini juga menyebabkan beban kerja petugas meningkat, sehingga konsentrasi dan efektivitas dalam melatih seni ukir semakin menurun. Hambatan SDM ini sekaligus menggambarkan lemahnya dimensi disposisi dalam implementasi, karena meskipun petugas memiliki komitmen yang kuat untuk membina narapidana, keterbatasan jumlah dan keterampilan membatasi ruang gerak mereka dalam mewujudkan tujuan program.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan seni ukir kentongan di Lapas Kelas IIB Sleman masih menghadapi tantangan besar pada hampir seluruh dimensi implementasi kebijakan. Kurangnya pelatihan eksternal menghambat aspek komunikasi dalam hal transmisi dan kejelasan informasi, keterbatasan sarana dan prasarana melemahkan faktor sumber daya yang seharusnya mendukung kelancaran pelaksanaan, dan keterbatasan jumlah serta keterampilan petugas menjadi kendala pada faktor SDM yang sangat menentukan keberhasilan pembinaan. Hambatan-hambatan ini saling berkelindan sehingga berdampak pada keterbatasan kualitas produk seni ukir yang dihasilkan, menurunkan potensi keuntungan ekonomi, dan mengurangi nilai strategis program sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana. Jika tidak segera diatasi dengan dukungan pelatihan eksternal, peningkatan fasilitas, serta penambahan tenaga pembina yang kompeten, maka tujuan utama program untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja sekaligus melestarikan warisan budaya melalui seni ukir kentongan dikhawatirkan tidak dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi program unggulan yang mengangkat nilai seni dan budaya, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang

berkaitan dengan dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menurut teori George C. Edwards III. Hambatan tersebut meliputi kurangnya keterampilan teknik ukir narapidana karena belum adanya pelatihan khusus dari pihak eksternal, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat pahat, bahan baku kayu, dan ruang produksi, serta keterbatasan jumlah dan keterampilan petugas yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan kurang maksimal. Oleh karena itu, diusulkan program Sosialisasi dan Pelatihan Narapidana "SOPAN" dengan melibatkan komunitas seni, ISI Yogyakarta, dan SMSR Yogyakarta melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, serta memberikan bekal yang bermanfaat bagi narapidana agar mampu hidup mandiri dan berdaya guna setelah bebas nanti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Arianto, P. (2020). Modul Metode Penelitian. In *Metode penelitian* (Vol. 5, Issue July).
- Bakar, A. (2020). UPAYA PENINGKATAN PENYESUAIAN SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Bitjara, D. I. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo. 17(April), 184–204.
- Damanik, B. S., & Anwar, U. (2022). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 236–243. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46874>
- Edward III, G. C. (1980). Public Policy Implementing. In *Literary and Linguistic Computing*.
- Fatahilah, S., & Jarodi, O. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>
- Habibi, I. I., & Warih, W. C. (2024). Implementasi Kegiatan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana yang Menjalani Masa Pidananya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi. 3(6), 7791–7801.
- Harefa, A. (2023). Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas Ii B Gunungsitoli. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 205–211.

- <https://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5451%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/download/5451/3028>
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *Perspektif*, 9(2), 465–482. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Hernanda, T., & Ashidiqi, T. (2020). Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Seni Ukiran Kayu. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 20–26.
- Hidayat, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 323–332.
- Juliansyah, M. R. (2024). PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA. 8(7), 119–126.
- Karimah, L. N., Shafwan, A.-F., & Tambunan, V. (2023). Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Community Development Journal*, 4(2), 4572–4577.
- Karisadini. (2025). EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGGUNAKAN MODEL CIPP. 6(1), 73–87.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September).
- Latifah, N. N., & Wahyuni, A. E. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 75(17), 399–405.
- Mufida, L. L. A., & Nasir, M. S. (2023). Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.15>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Hamil Yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2), 258–265. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9552>
- Nafiah, A., Sutadji, E., & Nurmallasari, R. (2020). Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 325. <https://doi.org/10.17977/um078v2i42020p325-334>
- Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal. (n.d.). Retrieved March 23, 2025, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya?page=all>

- Ndruru, Y. (2023). Implementasi Pembinaan Warga Binaan yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam). *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 90–100.
- Novrita, S. Z., & Asmar, Y. (2020). Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Pelatihan Keterampilan Bordir Bagi Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi. *Journal of Community Service*, 2(1), 024–032. <https://doi.org/10.56670/jcs.v2i1.30>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Purba, J. A., & Subroto, M. (2023). Analisis Tipe-Tipe Kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2168–2172. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1858>
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161–164. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>
- Qotrunada, M. F., & Rahayu, M. (2023). Kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana Bidang Pertanian di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19727>
- Rahardjo, M. M., & Anwar, U. (2022). Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4(2), 114. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v4i2.6634>
- Rahmat, D., Budi, S., Daniswara, W., & Halim, A. (2021). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurisprudencia*, 1(1), 11–18. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Regina, E. N., Febyanti, I., Nasution, M., Hidayat, N., Gaol, R. I. L., & Siregar, S. A. (2024). Pengaruh Kepadatan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Sumatera Utara Tahun 2012-2022. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 675–686. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2582>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Issue 143384).
- Rohi, Y. A., Pello, J., & Amalo, H. (2024). Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan Yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(1), 2.
- Sahir, S. H. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.*

- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535>
- Sari, E., Dharma, A. S., & Jumaidi. (2024). Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Program Pembinaan Kemandirian). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 126-131.
- Simak Kota Pilihan Orang Indonesia untuk Wisata - GoodStats Data. (n.d.). Retrieved March 23, 2025, from <https://data.goodstats.id/statistic/simak-kota-pilihan-orang-indonesia-untuk-wisata-UiiqX>
- Siregar, N. (2022). *Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial*. 15(1), 35-52.
- Sophia, N., & Hanani, R. (2022). IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG (LAPAS KEDUNGPAKE SEMARANG). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1-15.
- Statistik, B. P. (2024). *Data statistik pengangguran*. 36, 1-28.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Sutopo (Ed.); 5th ed.). ALFABETA.
- Sumiyati. (2021). *Makna Lambang dan Simbol kentongan Dalam Masyarakat Indonesia*.
- Sunia, U., Edison, & Kurnianingsih, F. (2023). Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, No. 1.
- Syaifuddin, A. (2022). Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Lamongan Melalui Keterampilan Kerajinan. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 127-136.
- Tiwa, R. C., Pasomah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompas Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3), 339-350.
- Ummah, M. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan “Mayo Sekolah” Sebagai Upaya Menekan Angka Anak Tidak Sekolah (Ats) Di Kabupaten Wonosobo. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Utami, R. N. F., Hermanto, R., Muhtadi, D., & Sukirwan, S. (2021). Etnomatematika: Eksplorasi seni ukir Jepara. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika)*, 7(1), 23-38. <https://doi.org/10.37058/jp3m.v7i1.2551>